

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian atau kajian terdahulu merupakan penelitian yang digunakan sebagai perbandingan penelitian yang akan dengan sudah dilakukan. Penelitian terdahulu diambil oleh peneliti berdasarkan tema dan topik yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun kajian terdahulu dapat diartikan sebagai sumber lampau dari hasil penelitian, sehingga dapat membantu maupun dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, kajian terdahulu dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam mengetahui kekurangan dan kelebihan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dapat dikembangkan untuk penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, penulis dapat membuat penelitian secara orisinal dan baru, karena sudah mengetahui aspek berbeda yang belum dijelaskan pada kajian sebelumnya.

Pertama, **Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014**, **A. Mulyawan, 2017**. Penelitian ini mengemukakan mengenai pemicu terjadinya konflik internal Partai Golkar dan elite. Kemudian peran Jusuf Kalla sebagai mediator dari kedua kubu serta dampak yang dihasilkan dari adanya konflik tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Mulyawan lebih berkonsentrasi mengenai dampak dan kehadiran faksi di dalam tubuh internal Golkar itu sendiri. Sedangkan pada penelitian kali ini, berfokus pada sumber-sumber atau faktor penyebab konflik dualisme dan proses konsensusnya. Ditambah teori yang

digunakan pada penelitian oleh Mulyawan menggunakan teori partai politik, teori konflik, dan teori elite. Berbeda dengan penelitian kali ini, teori yang digunakan hanya konflik politik dan partai politik, hal ini dikarenakan tidak ada sangkutpautnya antara konflik dualisme Golkar Kota Bekasi dengan peran elite-elite.

Kedua, **Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017, Rizky Fazila, 2017.** Kajian ini membahas mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya Dualisme kepengurusan pusat PPP dan upaya konsolidasi dari pengurus DPW PPP Aceh serta strategi dalam menghadapi pilkada serentak 2017. Awal mula dualisme adalah saat dikeluarkan keputusan dari Ketua Umum PPP terkait dukungan partai terhadap pasangan calon Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 yang mendapatkan beberapa penolakan dari sebagian kader dan elite partai. Teori partai politik dan teori konflik politik menjadi dua teori yang digunakan oleh Fazila. Hal yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan adalah pada objek penelitian. Di sini, Fazila mengangkat dualisme yang terjadi pada tingkat pusat, sedangkan penelitian saat ini berobjek pada kepengurusan tingkat kota.

Ketiga, **Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016, Meutya Viada Hafid, 2018.** Kajian ini mengangkat proses konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik internal partai yang terjadi tahun 2014-2016. Terdapat tiga jalur yang digunakan pada proses untuk mencapai kesepakatan, yakni jalur organisasi (Mahkamah Partai), jalur hukum (pengadilan), dan terakhir jalur politik. Digelarnya Munaslub Golkar tahun

2016 menyepakati banyak hal, di antaranya: menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, terbentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan manuver dukungan menjadi kubu pemerintah yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla. Terdapat perantara yang digunakan dalam menengahi perselisihan tersebut, yakni Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Keduanya bukan hanya sebagai representatif pemerintahan akan tetapi sebagai elite senior Golkar. Selain itu, terdapat perubahan di fraksi Golkar DPR RI. Sebagaimana Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dijabat oleh Setya Novantyo di mana ia menjadi kelompok pendukung Aburizal Bakrie. Sementara Agus Gumiwang Kartasasmita menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI yang berasal dari kubu Agung Laksono. Dampak yang dirasakan atas konflik ini, mempengaruhi hingga tingkat DPD. Dilaksanakan musyawarah untuk memilih Ketua DPD Partai Golkar yang dipilih oleh kepengurusan DPD tingkat I dan tingkat II, guna mengharmonisasikan kedua kepengurusan di daerah. Langkah ini juga diikuti sampai tingkat pusat, di mana Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sebagai pihak yang berkonflik diminta untuk tidak menyalonka diri kembali sebagai Pimpinan DPP Golkar, akan tetapi tetap menjaga citra keduanya tanpa ada yang merasa dirugikan. Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, sedangkan Agung Laksono diberikan kedudukan sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Teori yang digunakan adalah Teori Konsensus Politik dan Teori Elite. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada pembahasan karena penelitian dari Meutya konflik yang terjadi sudah mencapai konsensus. Selain itu, tidak dijelaskan secara mendetail faktor-faktor yang memicu konflik tersebut.

Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu

Penelitian	Teori	Pembahasan	Perbedaan
<p>Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014, A. Mulyawan, 2017</p>	<p>Teori Partai Politik, Teori Konflik, dan Teori Elite.</p>	<p>Penelitian ini mengemukakan mengenai pemicu terjadinya konflik internal Partai Golkar dan elite. Kemudian peran Jusuf Kalla sebagai mediator dari kedua kubu serta dampak yang dihasilkan dari adanya konflik tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Mulyawan lebih berkonsentrasi mengenai dampak dan kehadiran faksi di dalam tubuh internal Golkar itu sendiri. Sedangkan pada penelitian kali ini, berfokus pada sumber-sumber atau faktor penyebab konflik dualisme dan proses konsensusnya.</p>	<p>Perbedaan dapat dilihat dari teori yang digunakan, di mana pada penelitian saat ini hanya konflik politik dan partai politik. Dikarenakan pembahasan pada penelitian sekarang tidak ada sangkutpautnya dengan peran elite-elite terhadap konflik dualisme Golkar Kota Bekasi</p>
<p>Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017, Rizky Fazila, 2017</p>	<p>Teori Partai Politik dan Teori Konflik Politik</p>	<p>Kajian ini membahas mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya Dualisme kepengurusan pusat PPP dan upaya konsolidasi dari pengurus DPW PPP Aceh serta strategi dalam menghadapi pilkada serentak 2017. Awal mula dualisme adalah saat dikeluarkan keputusan dari Ketua Umum PPP terkait dukungan partai terhadap pasangan calon Prabowo-Hatta saat Pilpres 2014 yang mendapatkan beberapa penolakan dari sebagian kader dan elite partai.</p>	<p>Dualisme yang terjadi pada penelitian terdahulu berada di tingkat pusat, sedangkan penelitian sekarang terjadi di</p>

			<p>tingkat kota. Adapun pada rumusan masalah pada penelitian terdahulu juga mengangkat strategi yang digunakan saat pilkada serentak.</p>
<p>Konsensus Politik Dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016, Meutya Viada Hafid, 2018.</p>	<p>Teori Konsensus Politik dan Teori Elite</p>	<p>Kajian ini mengangkat proses konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik internal partai yang terjadi tahun 2014-2016. Terdapat tiga jalur yang digunakan pada proses untuk mencapai kesepakatan, yakni jalur organisasi (Mahkamah Partai), jalur hukum (pengadilan), dan terakhir jalur politik. Digelarnya Munaslub Golkar tahun 2016 menyepakati banyak hal, di antaranya: menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, terbentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan manuver dukungan menjadi kubu pemerintah yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla. Terdapat perantara yang digunakan dalam menengahi perselisihan tersebut, yakni Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Keduanya bukan hanya sebagai representatif pemerintahan akan tetapi sebagai elite senior Golkar. Selain itu, terdapat perubahan di fraksi Golkar DPR RI. Sebagaimana Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dijabat oleh Setya Novantyo di mana ia menjadi kelompok pendukung Aburizal Bakrie. Sementara Agus Gumiwang Kartasmita menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI yang berasal dari kubu Agung Laksono. Dampak yang dirasakan atas konflik ini, mempengaruhi hingga tingkat DPD. Dilaksanakan musyawarah untuk memiliki Ketua DPD Partai Golkar yang dipilih oleh</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada pembahasan karena penelitian dari Meutya konflik yang terjadi sudah mencapai konsensus. Selain itu, tidak dijelaskan secara mendetail faktor-faktor yang memicu konflik tersebut.</p>

	<p>kepengurusan DPD tingkat I dan tingkat II, guna mengharmonisasikan kedua kepengurusan di daerah. Langkah ini juga diikuti sampai tingkat pusat, di mana Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sebagai pihak yang berkonflik diminta untuk tidak menyalonka diri kembali sebagai Pimpinan DPP Golkar, akan tetapi tetap menjaga citra keduanya tanpa ada yang merasa dirugikan. Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, sedangkan Agung Laksono diberikan kedudukan sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.</p>	
--	---	--

2.2.Kerangka Teori

2.2.1.Teori Konflik Politik

Di dalam kehidupan sosial, konflik merupakan gejala yang tidak dipisahkan dan sangat melekat terutama dalam kehidupan politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa berpolitik merupakan seni dalam merebutkan kekuasaan dan bukan hanya membahas menang atau kalah dalam pemilihan, melainkan lebih kompleks seperti copotnya jabatan seseorang atau bahkan korban jiwa. Pada konflik politik tidak selalu mengandung kekerasan, melainkan juga ada yang tidak berwujud seperti itu. Misalnya, unjuk-rasa (demonstrasi), pemogokan, pembangkangan sipil, petisi dan protes dialog serta polemik melalui surat kabar.

Konflik politik menurut Maswadi Rauf merupakan setiap pertentangan dan perbedaan pendapat setidaknya dengan dua orang maupun

kelompok.¹⁰ Lebih lanjut, dijelaskan bahwa konflik adalah pertentangan atas perbedaan yang terjadi sehingga mengakibatkan sikap tidak terima oleh kedua belah pihak. Maswadi Rauf memandang bahwa konflik politik berkaitan dengan pemerintah, pejabat politik, dan kebijakan serta lebih sering terjadinya konflik kelompok dibandingkan konflik individu.

Maswadi Rauf menyatakan bahwa terdapat tiga pemicu konflik politik. Pertama, struktur politik yang terdiri dari penguasa politik dan orang-orang yang dikuasai. Dengan begitu, konflik ini terjadi di antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik. Kedua keterbatasan sumber daya atau posisi, di mana semakin langka suatu jabatan akan semakin besar memicu konflik. Perebutan jabatan politik yang dinamakan sebagai konflik politik. Terakhir adalah prinsip kesenangan. Para penguasa politik cenderung mempertahankan maupun meningkatkan kesenangannya melalui kekuasaan yang dimiliki, sehingga apabila terdapat kubu atau pihak yang menentang, mengkritik, atau menyalahkannya mengakibatkan timbulnya konflik.¹¹

Secara sederhana konflik politik bersumber dari perbedaan pendapat yang berkaitan dengan sistem politik, mencakup kebijakan dan kepentingan para penguasa politik. Ketidak-puasan suatu kelompok yang berhubungan dengan perumusan maupun pengimplementasian kebijakan. Pada dasarnya konflik politik dapat berupa adu argumen, persaingan, maupun pertentangan, baik dari individu maupun kelompok.

¹⁰ Maswadi, R. (2001):29. Konsensus dan konflik politik. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

¹¹ *Ibid*

Secara umum konflik politik disebabkan dua hal, meliputi kemajemukan horizontal dan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat majemuk secara kultural, misalnya etnisitas, agama, dan ras. Sementara kemajemukan vertikal merupakan struktur masyarakat majemuk secara sosial. Seperti, petani, buruh, pedagang, pengusaha, pedesaan, perkotaan, dsb.

Konflik terjadi disaat terdapat benturan kepentingan atau dapat dijelaskan apabila ada pihak yang merasa tidak diberlakukan secara tidak adil. Dengan demikian, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan hal yang pasti ada dalam menimbulkan konflik, namun perbedaan kepentingan tersebut bukan merupakan kondisi yang memadai dalam timbulnya konflik.¹²

Penyebab konflik politik secara umum, dibagi menjadi tiga: struktur politik; sumber daya dan posisi yang terbatas, dan prinsip kesenangan. Pertama, penguasa politik dan beberapa orang yang dikuasai merupakan bagian dari struktur, di mana kedua tokoh tersebut merupakan objek dari kekuasaan politik. Kedua, seperti sudah diketahui bahwa kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan atau diinginkan, cenderung meningkatkan timbulnya konflik politik, terutama perebutan jabatan politik yang terbatas. Konotasi jabatan bukan hanya status maupun posisi, melainkan dapat berupa seberapa besar pengaruh seseorang. Ketiga, guna mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan hidupnya, para penguasa politik akan

¹² Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. 2010. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 194

mengkritik, menyalahkan, menentang, dan menggugat para pihak yang bersebrangan dengannya. Maka dari itu, tindakan seperti ini cukup memicu adanya konflik politik.

Pada hakikatnya, situasi konflik dapat dibagi menjadi dua menurut Paul Conn, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang (*non-zero-sum conflict*)¹³. Situasi konflik yang tidak memberikan kesempatan terjadinya kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dan bersifat antagonistik merupakan definisi dari konflik menang-kalah. Selain itu, terdapat ciri-ciri struktur konflik ini seperti: pengadaan kerjasama termasuk hal yang tidak mungkin; setelah konflik berakhir dan mengeluarkan hasil, hanya dapat dinikmati oleh pihak yang menang saja; dan biasanya yang dipertaruhkan terkait hal-hal yang mengandung prinsipil (harga diri, keamanan, kemaslahatan, atau jabatan).

Berbeda dengan konflik menang-menang yang memiliki situasi konflik yang masih memungkinkan terjadinya kompromi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat, sehingga semua pihak mendapatkan bagian “kenikmatan” dari hasil konflik tersebut secara maksimal. Melalui pengadaan dialog, kompromi, dan kerjasama barulah menghasilkan keuntungan bersama dan hal-hal yang diributkan tidak bersifat prinsipil, tetapi juga bukan hal yang tidak penting.

Pihak-pihak yang terlibat konflik pada dasarnya akan mempertimbangkan untung-rugi, di mana mereka berupaya

¹³ Paul Conn, *Conflict and Decision Making: An Introduction to Political Science*. 1971. New York: Harper & Row Publisher. 107.

memaksimalkan perolehan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Hal ini merupakan tujuan atau pencapaian dari konflik dalam mempertahankan sumber-sumber yang sudah dikuasai selama ini.¹⁴ Maka dari itu, situasi konflik dalam mencapai tujuan dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama berupaya mendapatkan sesuatu atau memiliki tujuan yang sama;
- b. Terdapat satu pihak berupaya mempertahankan apa yang dimiliki, sedangkan pihak lain mencoba untuk mendapatkannya.¹⁵

2.2.2. Teori Konsensus Politik

Resolusi konflik memiliki gagasan utama adalah terciptanya konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan terdapat upaya dalam menyeimbangkan kepentingan guna tercapai kesepakatan bersama atau konsensus bersifat saling menguntungkan. Biasanya, resolusi konflik merujuk pada sebab-sebab konflik dibandingkan manifestasi dari konflik itu sendiri. Konflik politik adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial di mana terjadi gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Manajemen konflik atau pengelolaan konflik merupakan peran yang juga dimiliki oleh penguasa politik. Mereka diberikan kewenangan untuk membentuk berbagai ketentuan terhadap individu agar bertindak secara terbatas guna menjaga

¹⁴ Ramlan Surbakti, Op.Cit., hal. 199

¹⁵ Ibid

kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi kekuasaan yang sangat besar ini, justru dapat mendorong penguasa politik untuk mewujudkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Sehingga penguasa politik tidak mencerminkan perannya sebagai pengatur konflik dan justru menjadi dalang atas konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena orientasinya yang tertanam untuk mengejar kekuasaan.

Konsensus merupakan upaya yang dilakukan guna menyelesaikan atau menghilangkan konflik melalui berdialog untuk mencari kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Urgensi penyelesaian konflik sangat besar, mengingat apabila konflik dibiarkan maka perbedaan dari pihak-pihak yang berselisih semakin tajam dan meluas, sehingga munculnya pihak-pihak baru yang terlibat di dalamnya.¹⁶

Berakhirnya konflik dapat dilihat dari semua pihak yang berkonflik merasa adil karena telah menemukan titik terang atas perbedaan yang selama ini mereka alami. Adapun terdapat dua cara untuk mencapai konsensus atau kompromi, yaitu konsensus tanpa perantara dan konsensus dengan perantara. Selanjutnya kedua cara itu, akan berakhir pada empat model yang sudah disusun oleh Maswadi Rauf, yakni:¹⁷

- (1) Konsensus Model Pendapat Internal, yaitu segala poin-poin perbedaan persepsi dari pihak-pihak berkonflik disepakati untuk dibuang. Sehingga hanya menggunakan pendapat yang sama;

¹⁶ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. 2000. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 8-9.

¹⁷ *Ibid*, hlm 9

(2) Konsensus Model Pendapat Dominan merupakan konsensus yang memerhatikan pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik di mana memiliki kekuasaan atau status secara dominan dan mengakibatkan kesepakatan dengan seluruh pihak;

(3) Konsensus Model Pendapat Luar, yakni pendapat yang dimiliki oleh pihak yang berkonflik akan dibuang berdasarkan kesepakatan bersama dan diganti dengan pendapat baru guna dijadikan konsensus untuk pihak-pihak berkonflik;

(4) Konsensus Model Gabungan di mana menggabungkan antara pendapat dari salah satu pihak dengan pendapat pihak luar sebagai upaya konsensusnya.

Lebih lanjut, dari keempat model di atas konflik politik dapat mengajukan konsensus model pengadilan apabila tidak menemukan titik temu atau gagal dari pelaksanaan empat model sebelumnya. Model pengadilan tidak berdasarkan pada pendapat pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak luar. Akan tetapi berdasarkan hukum yang berlaku berupa keputusan pengadilan agar dapat mengakhiri perselisihan.

Berdasarkan praktis, hal yang pertama kali dilakukan saat berhadapan konflik biasanya melakukan negosiasi, mediasi, dan terakhir rekonsiliasi.¹⁸ Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan bersama antar pihak yang berpekar. Sedangkan mediasi merupakan bentuk dari negosiasi konflik

¹⁸ A.A Banyu Perwita dan NabiIa Sabban, *Kajian Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

antara pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bertugas membantu mencapai kompromi. Selanjutnya, konsoliasi merupakan pengaturan konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan adanya ruang diskusi dan proses pengambilan keputusan di antara para pihak bersengketa. Terakhir arbitrase merupakan upaya yang diselesaikan melalui keputusan peradilan atau pihak ketiga atas konflik yang berlangsung.

2.3.2. Teori Partai Politik

Menurut Carl Friedrich, partai politik adalah kelompok manusia yang diorganisir sedemikian rupa untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di pemerintahan serta kekuasaan dapat memberikan keuntungan bagi kader maupun perkembangan yang lain.¹⁹ Sehingga dapat terlihat bahwa partai politik tidak terlepas dari suatu kekuasaan.

Richard M. Merelman berpendapat bahwa partai politik sebagai media yang sudah dirancang oleh manusia dalam mewujudkan berbagai tujuan politik dan dianggap paling efektif untuk mencapai hal tersebut.²⁰ Dapat dikatakan, partai politik sebagai senjata utama manusia untuk memuaskan keinginan mereka pada aspek politik dan kekuasaan. Pandangan Miriam Budiarto terhadap partai politik hampir sama dengan pemaparan Carl Friedrich yang menyatakan partai politik sebagai kelompok terorganisir yang di dalamnya memiliki tujuan, nilai-nilai (*values*), dan impian yang

¹⁹ Kencana, Inu. 2003. Sistem Administrasi Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 103.

²⁰ Rahman, Arifin. 1998. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC. 90.

sama setiap anggotanya. Kelompok ini bertujuan memperoleh kekuasaan politik serta menjalankan kebijakan-kebijakan partai melalui kekuasaan yang didapatkan tersebut.²¹ Walaupun partai politik digambarkan lebih sering untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi melihat penjelasan definisi di atas secara garis besar untuk mendapatkan kekuasaan politik. Setelah mencapai tujuan tersebut melalui jabatan ataupun sebagai tokoh berpengaruh, barulah partai politik dapat menghasilkan kebijakan bagi masyarakat.

Adapun Miriam Budiardjo di dalam bukunya menyatakan empat fungsi partai politik di negara demokrasi, yang dianggap lebih sederhana dibanding fungsi dari Heywood sebelumnya, yaitu:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Pada fungsi ini harus melewati dua proses. Pertama adalah menampung dan menggabungkan pendapat maupun aspirasi orang lain. Hal ini bertujuan agar pendapat dan aspirasi tersebut tidak diabaikan secara mudahnya, serta proses ini dinamakan agregasi kepentingan. Kedua, pasca melewati proses sebelumnya barulah terakhir diolah dan dirumuskan ke dalam yang lebih teratur atau disebut perumusan kebijakan. Sigmund Neumann berpandangan bahwa yang dimaksud komunikasi politik adalah peran partai yang menjadi perantara besar dalam menghubungkan berbagai kekuatan dan ideology sosial

²¹ Miriam Budiardjo. 1998. Partisipasi Dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.16.

terhadap lembaga pemerintahan formal dan yang mengimplementasikan melalui aksi politik di tengah masyarakat luas.²²

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Wadah seseorang dalam mengetahui sikap dan pandangan terkait fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi. Biasanya berlaku seumur hidup dan terjadi di mana ia berada dengan pendekatan dari keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman orang yang lebih dewasa, organisasi keagamaan dan partai politik. Melalui sosialisasi politik juga, dapat meningkatkan citra partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga membantu mereka untuk memperoleh dukungan guna menduduki jabatan pemerintahan.

c. Sebagai Sarana Kaderisasi atau Rekrutmen Politik

Partai politik sangat butuh kader-kader yang berkualitas untuk mencapai tujuan yakni mengajukan calon ke dalam bursa pimpinan internal maupun nasional. Sehingga diperlukan rekrutmen politik atau seleksi kepemimpinan. Adapun tujuan dari rekrutmen politik adalah memperluas keanggotaan dan kelestarian partai.

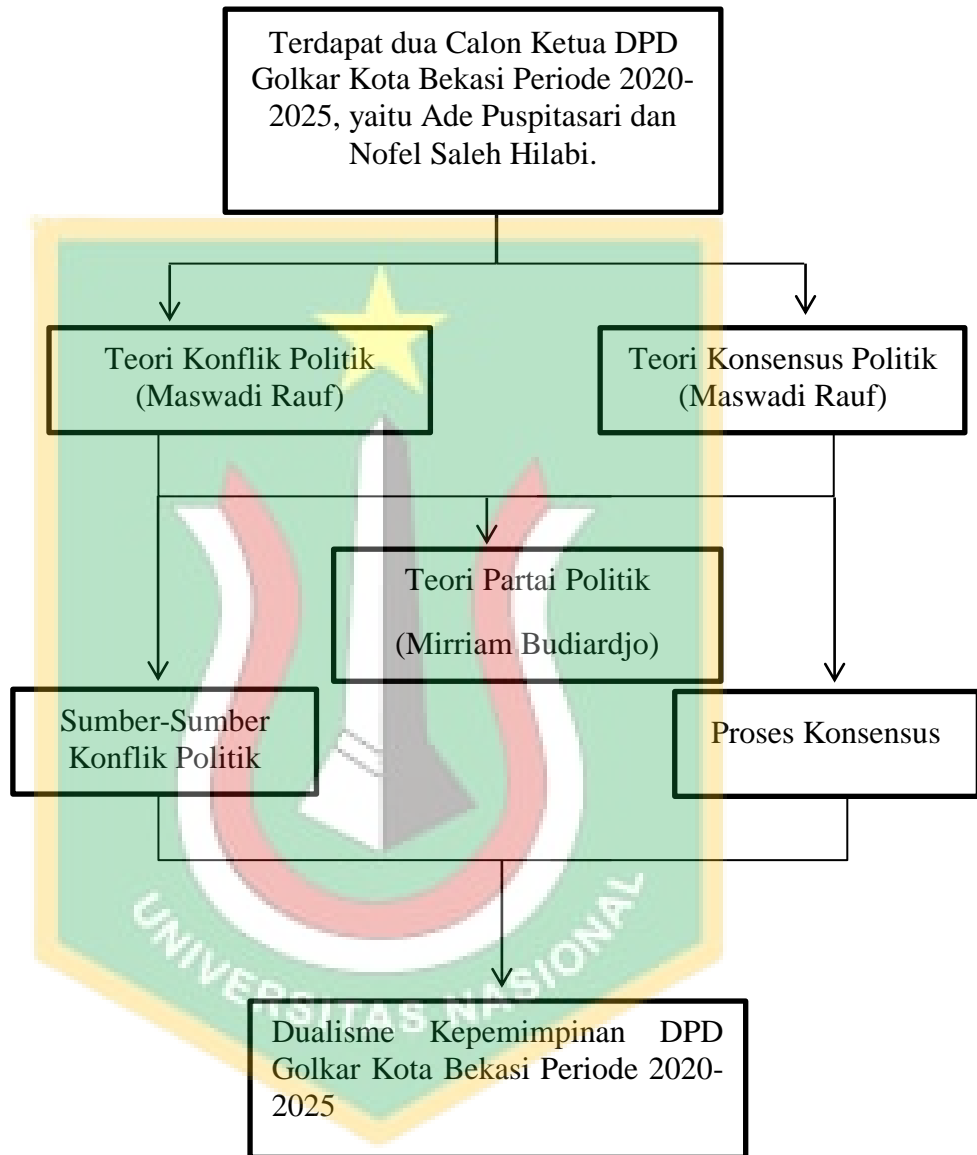
d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

²² Neumann, Sigmund, 1956. *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*. Chichago: University of Chichago. 27.

Sebagai negara yang memiliki masyarakat heterogen, partai politik diharapkan dapat mengatasi konflik dan menekan dampak negatif seminimal mungkin.²³ Partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengatur konflik. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh suatu partai politik dalam mengendalikan konflik, yakni mengajak berdialog kepada pihak-pihak yang terlibat; mendengarkan dan menyeleraskan segala aspirasi atau masukan maupun kepentingan dari berbagai pihak yang berkonflik; dan mengambil langkah melalui pengajuan untuk diadakan musyawarah di dalam badan perwakilan rakyat atau legislatif untuk diberikan suatu keputusan politik. Sehingga diperlukan kelarasan antara petinggi lembaga dengan partai politik. Apabila tidak terjalin kompromi, bukannya partai politik sebagai saran pengatur konflik, melainkan justru pembuat konflik.

²³ Miriam Budiarjo, Op.Cit., hal. 406-409

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran